



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Persepsi, Pengalaman, dan Rekomendasi Pemangku Kepentingan terkait Mis/Disinformasi dan Tata Kelola Informasi di Indonesia

Beltsazar Krisetya, Arya Fernandes, Ega Kurnia Yazid
CSIS/Safer Internet Lab



@saferinetlab



Safer Internet Lab



saferinternetlab.org

Tujuan

- Berkembangnya AI generatif dan ragam format konten *online* **menuntut pembaruan definisi mis/disinformasi**. Namun, tampaknya belum ada konsensus antar pemangku kepentingan tentang konten mana saja yang termasuk mis/disinformasi dan yang bukan.
- Pemilu 2024 menjadi pemicu untuk kolaborasi antarpihak (pemerintah, platform teknologi, masyarakat sipil, media) menangani mis/disinformasi. Pasca pemilu, **masih belum terbaca** apakah pengalaman kolaborasi ini akan **berlanjut atau berakhir dengan sendirinya**.
- Dari beragam jenis program dan langkah untuk menanggulangi mis/disinformasi, perlu dilakukan pengukuran pendapat ahli terkait **langkah mana yang dinilai efektif dan kurang efektif** agar dapat menjadi *baseline* evaluasi program ke depan.



Metode Survei

Aspek	Penjelasan
Target narasumber	Responden survei mewakili spektrum luas kelompok pemangku kepentingan dalam tata kelola informasi di Indonesia, meliputi: Pemerintah (kementerian, lembaga penegakan hukum, lembaga penyelenggara pemilu), platform teknologi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan media massa.
Sumber Data	(1) Basis data pemangku kepentingan CSIS; (2) Formulir aplikasi untuk menjadi narasumber. (3) Metode snowballing dari wawancara dengan responden sebelumnya.
Ukuran Sampel	Target responden 200 orang . Survei berhasil mewawancarai 194 responden . Setelah proses validasi dan verifikasi, sebanyak 189 responden dinyatakan lolos verifikasi, sementara 5 responden tidak memenuhi kriteria verifikasi. Data survei ini menggunakan 189 responden.
Metode Wawancara	58,29% wawancara dilakukan secara tatap muka langsung. Sisanya dilakukan secara daring (Zoom), khususnya untuk responden yang berada di luar Jakarta atau luar negeri. Meskipun demikian, metode tatap muka tetap menjadi preferensi utama.
Kendali Mutu	Kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari rekrutmen responden, pelaksanaan pelatihan enumerator, proses pengumpulan data, hingga validasi dan verifikasi data.
Periode Survei	15 November – 30 Desember 2024.

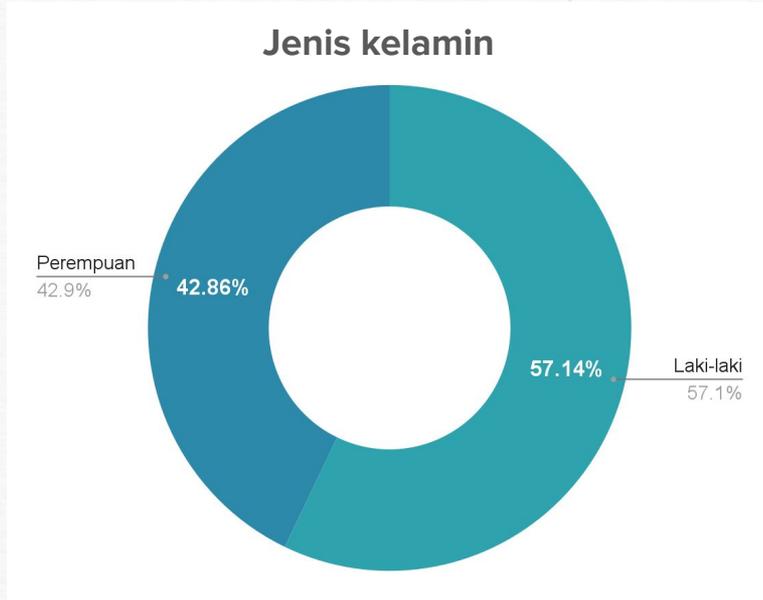


Pertanyaan yang dieksplorasi

- Bagaimana pemangku kepentingan memandang prevalensi dan dampak mis/disinformasi--termasuk yang berbasis AI--[terhadap kepercayaan publik dalam konteks Pemilu 2024?](#)
- Kelompok aktor mana saja yang paling berperan dalam produksi dan penanggulangan mis/disinformasi di Indonesia, dan bagaimana tingkat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganannya?
- Model penanganan dis/misinformasi mana sajakah yang dinilai efektif, dan apa saja tantangan-tantangan yang timbul dalam upaya moderasi konten dan literasi informasi?
- Apa [tantangan utama](#) dalam membangun model kolaborasi multi-stakeholder yang berkelanjutan dalam penanganan mis/disinformasi?



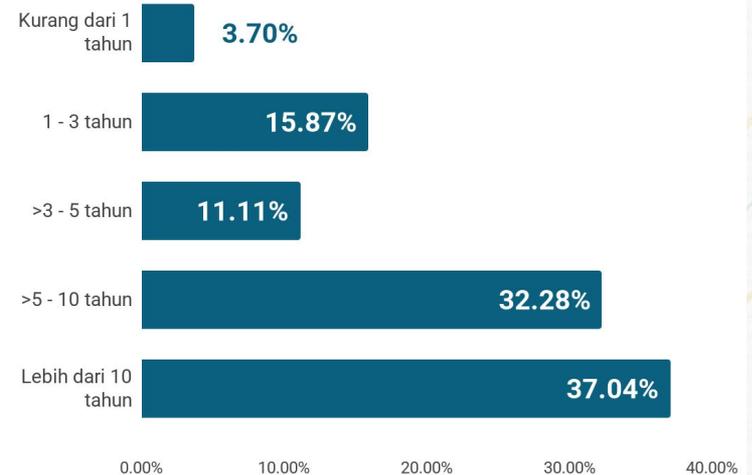
Profil Responden



Mayoritas responden berjenis kelamin **laki-laki (57,1 persen)** disusul oleh **perempuan (42,9 persen)**

Sudah berapa lama Anda bekerja di bidang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial, dan platform digital?

Pengalaman kerja bidang digital

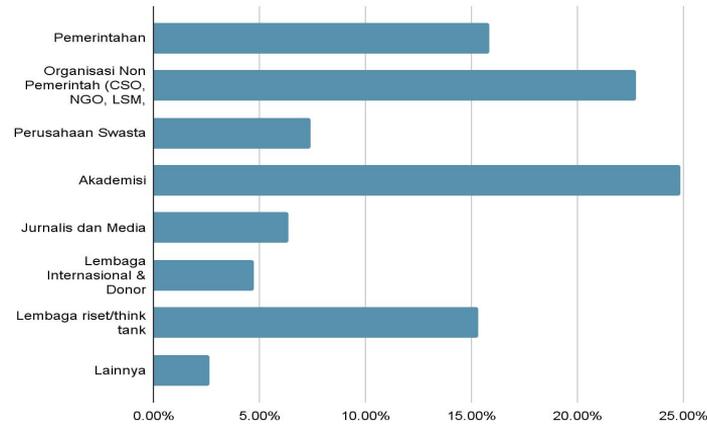


Mayoritas responden berpengalaman di bidang ICT dan digital **lebih dari lima tahun (69,32 persen)**



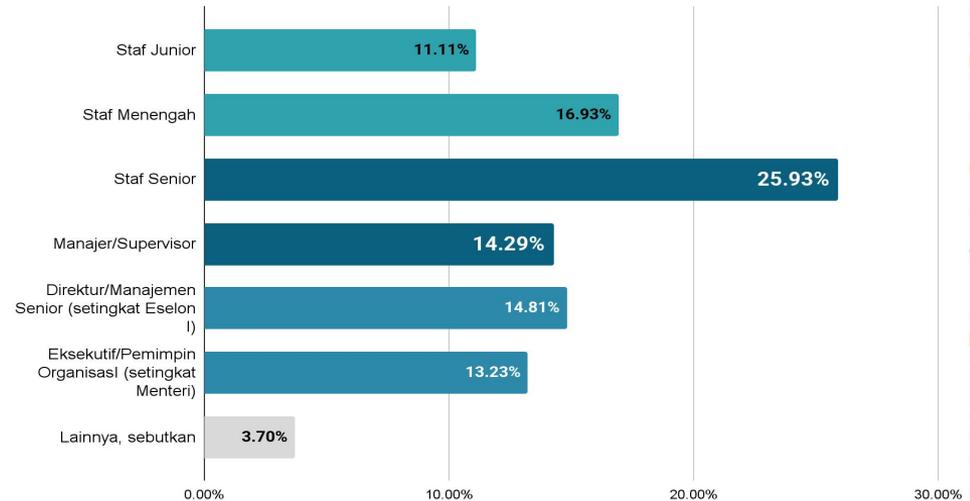
Profil Responden

Kelompok pemangku kepentingan mana yang paling menggambarkan peran Anda dalam ekosistem informasi digital di Indonesia saat ini?



Survei menanyakan pandangan responden **sebagai individu**, bukan perwakilan dari lembaga/organisasi. Sebagian responden juga memiliki pengalaman bekerja di lebih dari satu sektor.

Apa posisi Anda dalam organisasi Anda saat ini?

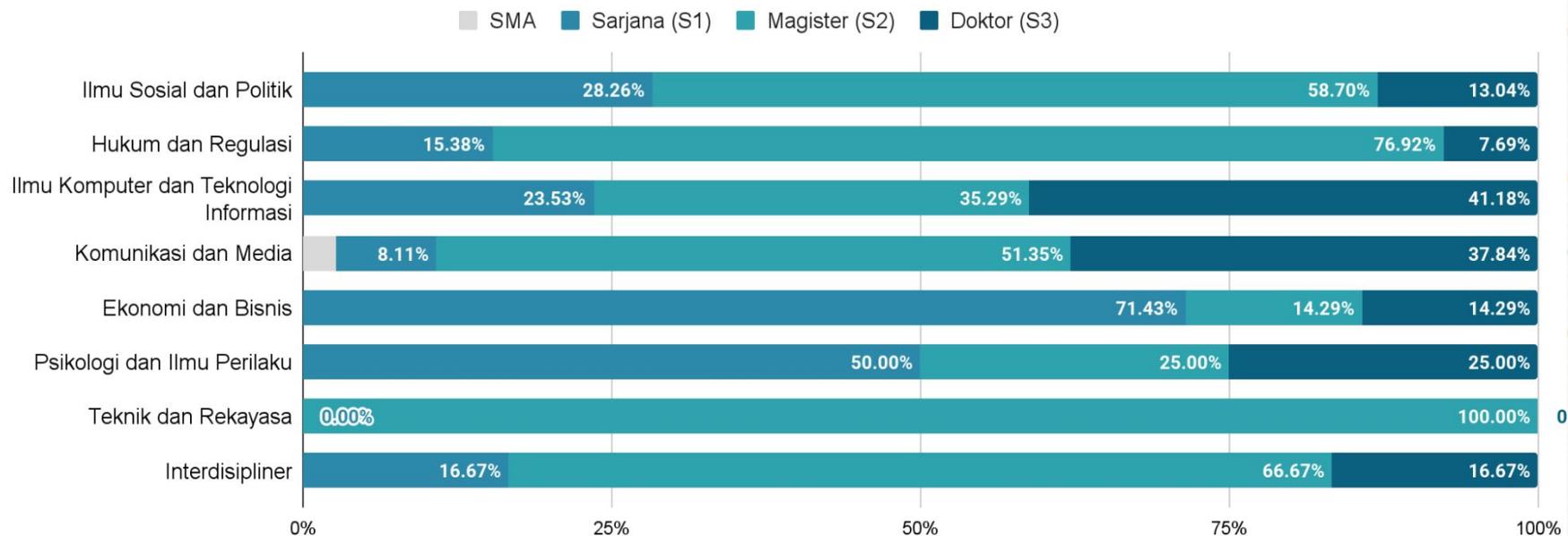


Mayoritas responden berposisi sebagai **staf senior atau manajer (40,22 persen)**. Sedangkan proporsi responden dengan posisi direktur/pimpinan organisasi (**28,04 persen**) seimbang dengan staf junior dan menengah (**28,04 persen**)



Profil Responden

Bidang Studi dan Pendidikan Terakhir



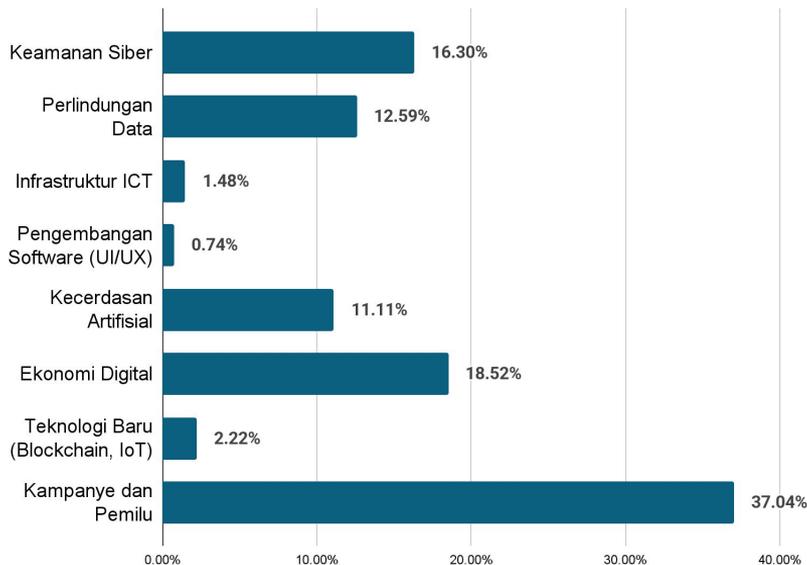
Sebagian besar responden berjenjang pendidikan **magister/S2 (55,56 persen)**, disusul dengan **Sarjana/S1 (24,34 persen)**.

Responden berjenjang pendidikan **Doktor/S3** sebesar **19,58 persen**.



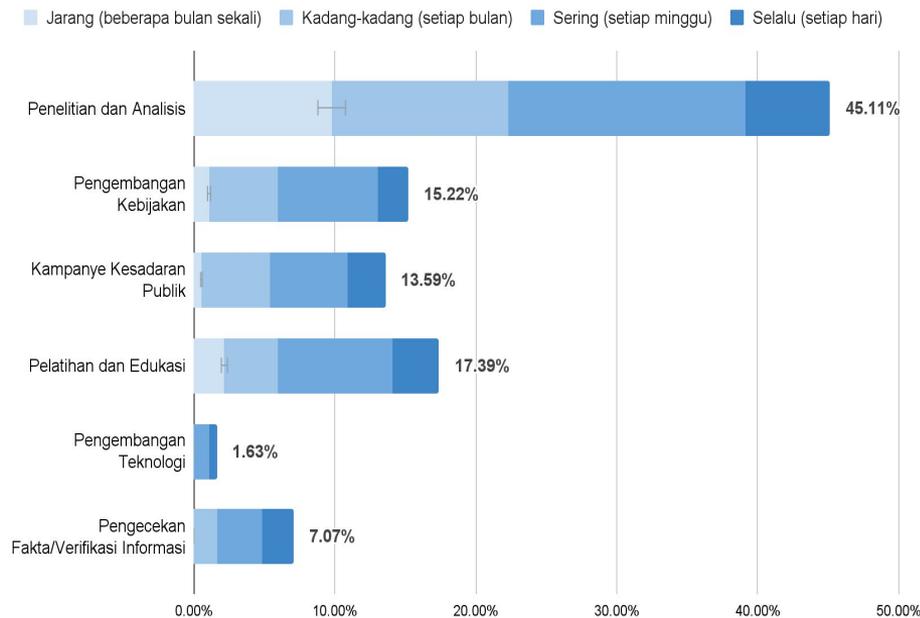
Profil Responden

Apa bidang keahlian yang paling mewakili Anda?



Lebih dari sepertiga (37,04 persen) responden menyebutkan bidang keahlian utama di **kampanye dan pemilu**.

Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam kegiatan atau inisiatif terkait mis/disinformasi, dan dalam kapasitas apa?



Frekuensi partisipasi responden dalam kegiatan/inisiatif mis/disinformasi **cukup seimbang** antara yang sering dan jarang.



Bagian Pertama

**Ketika membicarakan mis/disinformasi,
apakah kita sudah sepaham?**



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google

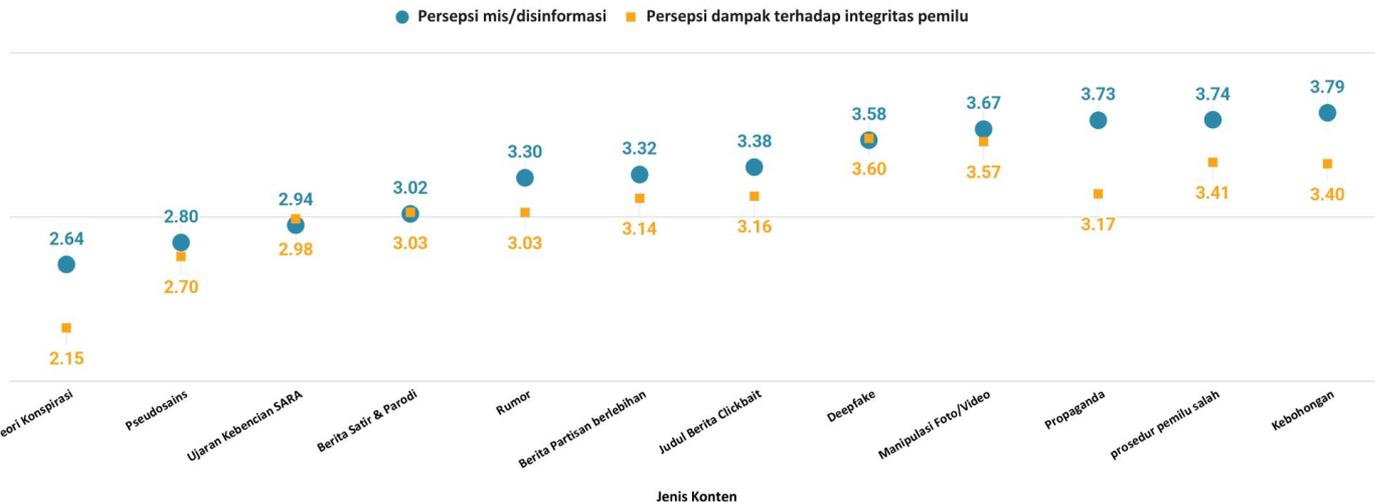


Persepsi mis/disinformasi

Tergolong mis/disinformasi

Tidak tergolong mis/disinformasi

Apakah konten berikut tergolong mis/disinformasi, dan seberapa serius dampaknya terhadap integritas pemilu 2024?



Sangat berdampak terhadap integritas pemilu

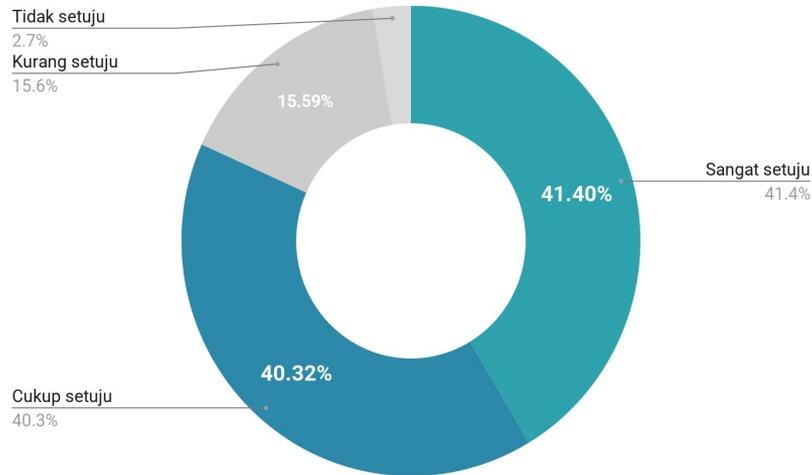
Tidak berdampak terhadap integritas pemilu

Konten **deepfakes** (rata-rata 3,60) dan **manipulasi foto/video** (rata-rata 3,57) dipersepsikan memiliki dampak terbesar terhadap integritas pemilu. Sedangkan responden masih belum terlalu yakin apakah **ujaran kebencian/SARA** dan **berita satir & parodi** tergolong sebagai mis/disinformasi. Variasi jawaban responden terhadap beragam jenis konten menunjukkan bahwa pemangku kepentingan belum sepenuhnya menyepakati tipe konten mana yang dikategorikan sebagai mis/disinformasi.

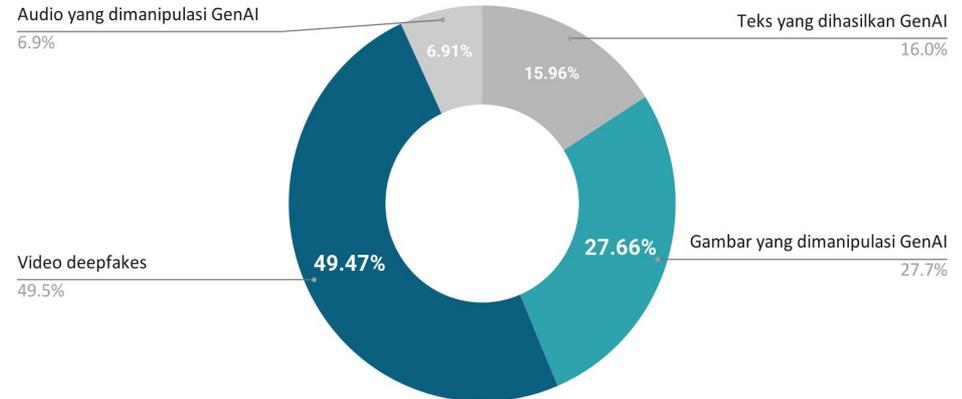


Persepsi mis/disinformasi berbasis AI generatif

Sejauh mana Anda setuju/tidak setuju bahwa teknologi kecerdasan buatan generatif (GenAI) meningkatkan produksi dan penyebaran disinformasi selama Pemilu 2024?



Jenis mis/disinformasi berbasis AI manakah yang menjadi ancaman terbesar bagi integritas Pemilu 2024?

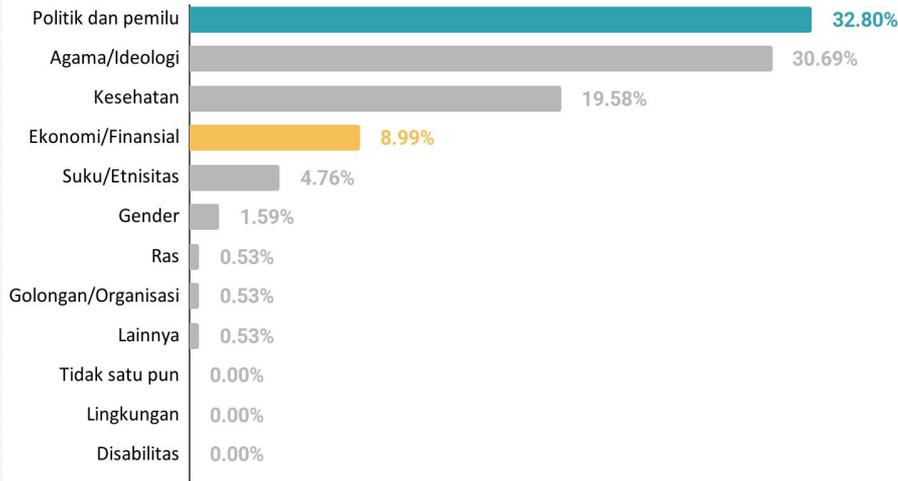


Mayoritas responden setuju (81,72 persen) bahwa *generative-AI* meningkatkan produksi dan penyebaran mis/disinformasi selama pemilu 2024. Bentuk mis/disinformasi berbasis *gen-AI* yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi integritas pemilu adalah **video deepfakes** (49,47 persen) dan **gambar manipulasi *gen-AI*** (27,66 persen).



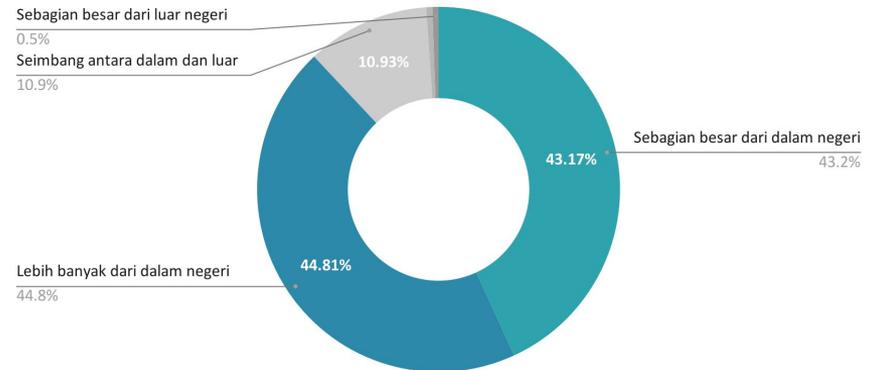
Topik dan Asal Mis/Disinformasi

Topik mis/disinformasi tentang apa yang menurut Anda paling merugikan masyarakat?



Sebagian besar responden menganggap topik **politik dan pemilu (32,8 persen)**, **agama/ideologi (30,69 persen)**, dan **kesehatan (19,58 persen)** sebagai topik mis/disinformasi yang paling merugikan masyarakat.

Menurut Anda, berasal dari manakah penyebaran mis/disinformasi di Indonesia?



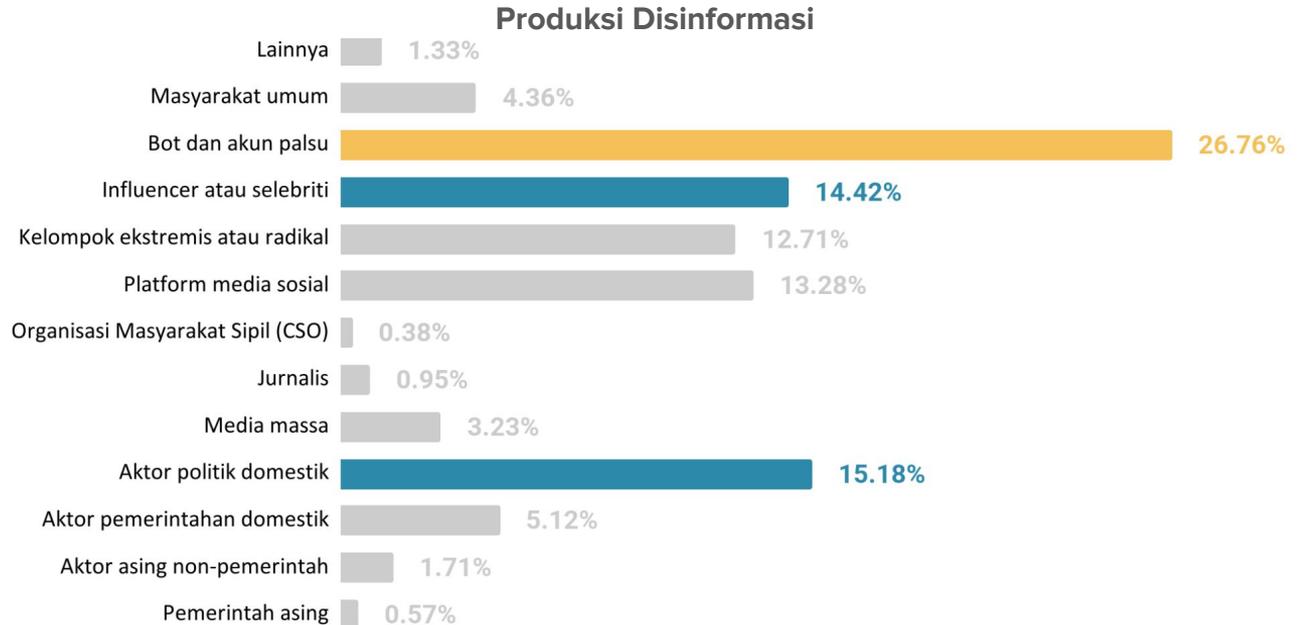
Responden menganggap bahwa mis/disinformasi di Indonesia **sebagian besar berasal dari dalam negeri (43,17 persen)** atau **lebih banyak dari dalam negeri (44,81 persen)**.



Persepsi aktor produksi disinformasi

Bot dan akun palsu (26,76 persen) menjadi jawaban yang paling sering muncul sebagai aktor yang paling berkontribusi terhadap produksi disinformasi. Disusul oleh **influencer atau selebriti (14,42 persen)** dan **aktor politik domestik (15,18 persen)**.

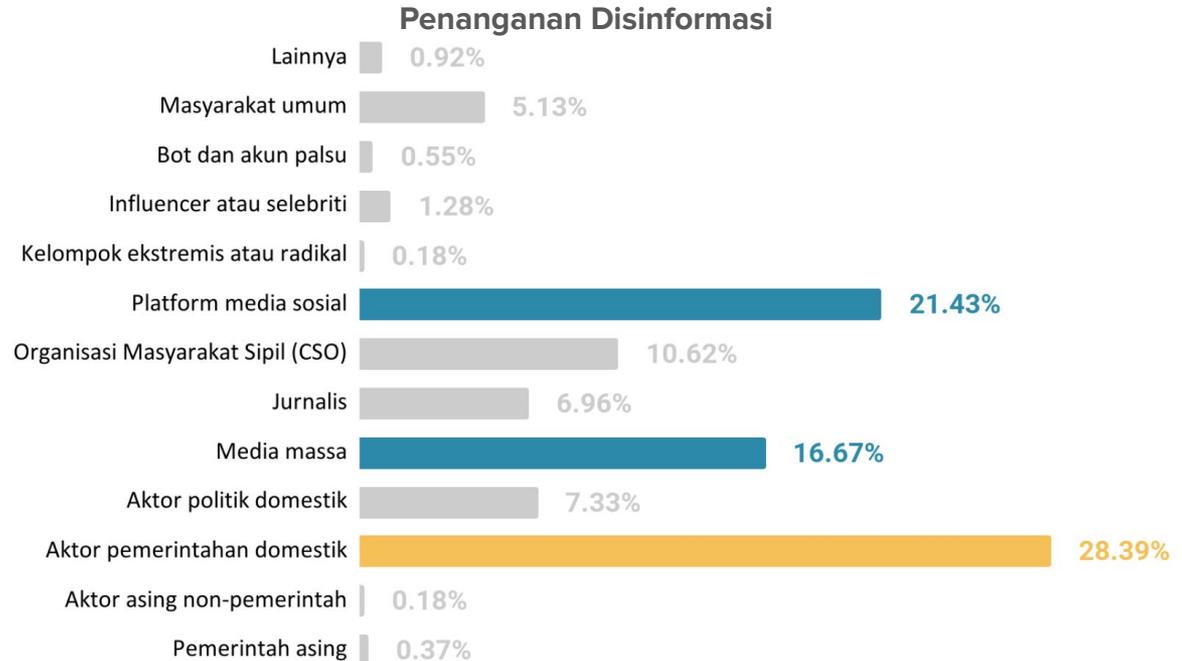
Menurut pendapat Anda, manakah dari sumber-sumber berikut yang kontribusinya paling signifikan terhadap produksi disinformasi di Indonesia? (pilih tiga, jumlah jawaban = 527)



Persepsi aktor penanganan disinformasi

Aktor pemerintahan domestik (28,39 persen) menjadi jawaban yang paling sering muncul sebagai aktor yang dinilai paling bertanggung jawab untuk menangani disinformasi di Indonesia. **Media massa (16,67 persen)** dan **platform media sosial (21,43 persen)** pun dianggap perlu berperan menciptakan ekosistem informasi yang baik.

Menurut Anda, siapa saja aktor yang paling bertanggung jawab dalam penanganan disinformasi di Indonesia? (pilih tiga, jumlah jawaban = 546)



Bagian Kedua

Sudah cukupkah langkah-langkah yang kita tempuh untuk menanggulangi mis/disinformasi?



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google

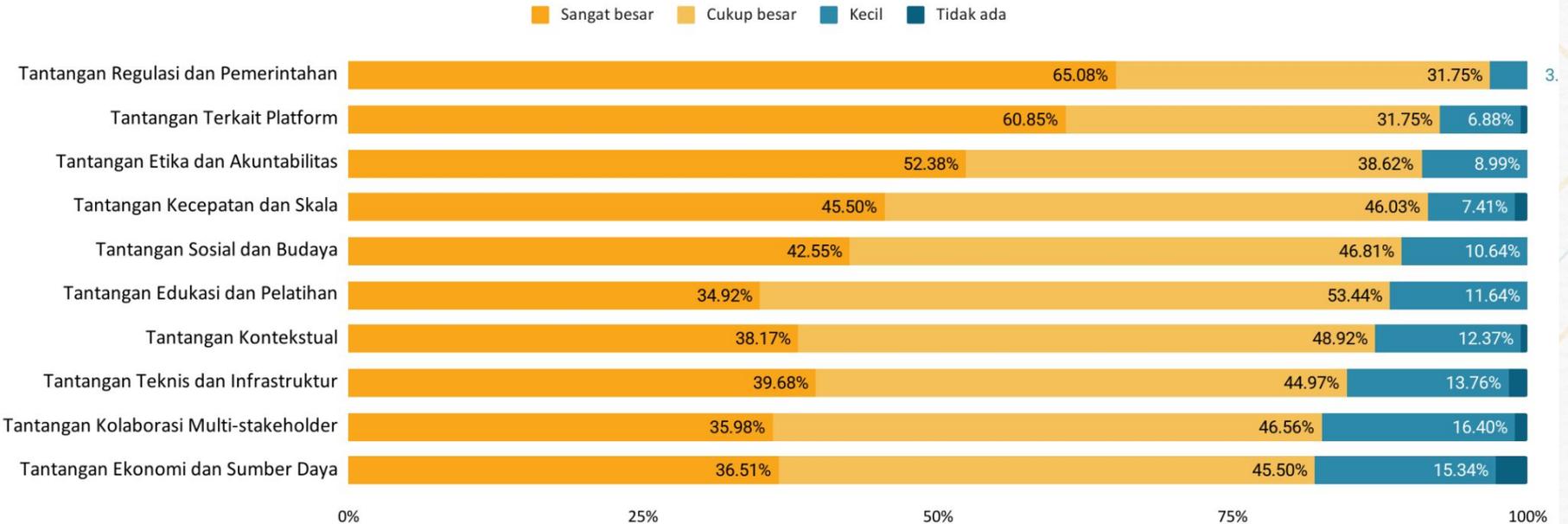


Dalam survei ini, kami mendefinisikan **moderasi konten** sebagai proses **pemantauan dan penyaringan konten** yang dibuat pengguna di platform digital, untuk memastikan kesesuaiannya dengan **standar dan pedoman tertentu**.



Tantangan Moderasi Konten

Seberapa besar/kecil tantangan-tantangan moderasi konten berikut bagi Indonesia saat ini?

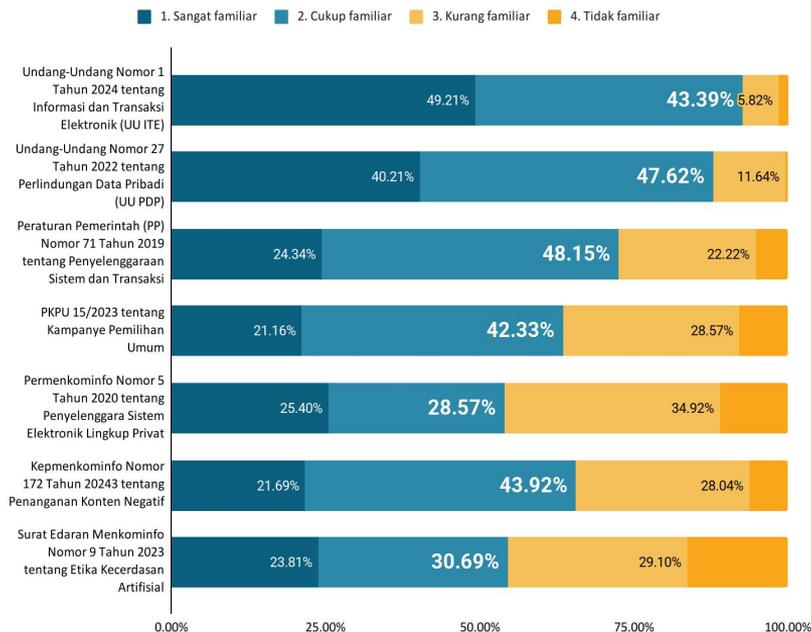


Mayoritas responden menjawab bahwa proses moderasi konten masih menemui tantangan (**rata-rata 88,6 persen**). Tantangan yang berkaitan dengan **regulasi dan pemerintahan** dianggap sebagai tantangan terbesar, dengan **96,83 persen** responden menjawab “sangat besar/besar” pada klaster jawaban tersebut.

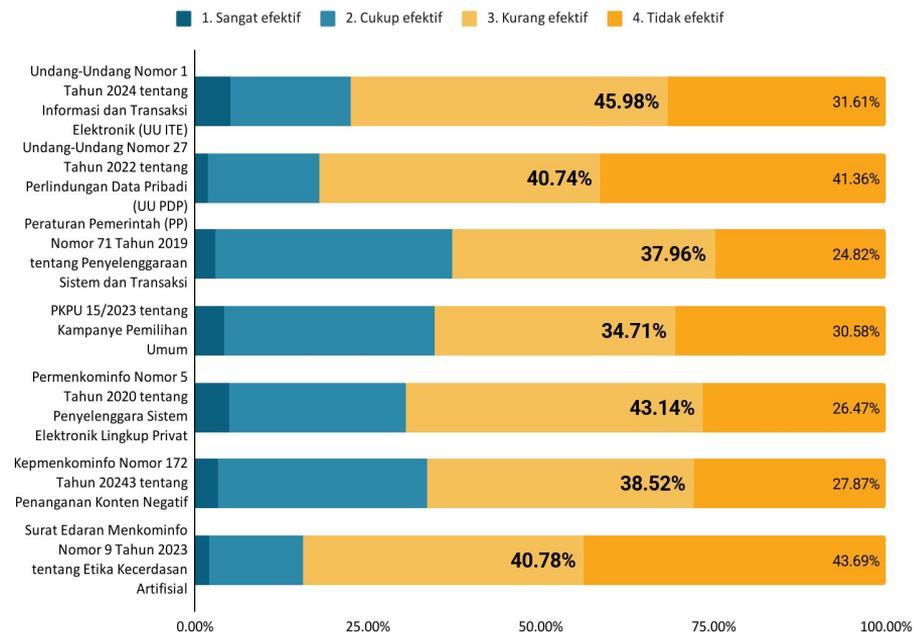


Familiaritas responden dan penilaian efektivitas regulasi

Seberapa **familiar** Anda dengan peraturan-peraturan berikut?



Menurut Anda, apakah peraturan-peraturan berikut **efektif/tidak efektif** untuk menangani mis/disinformasi?

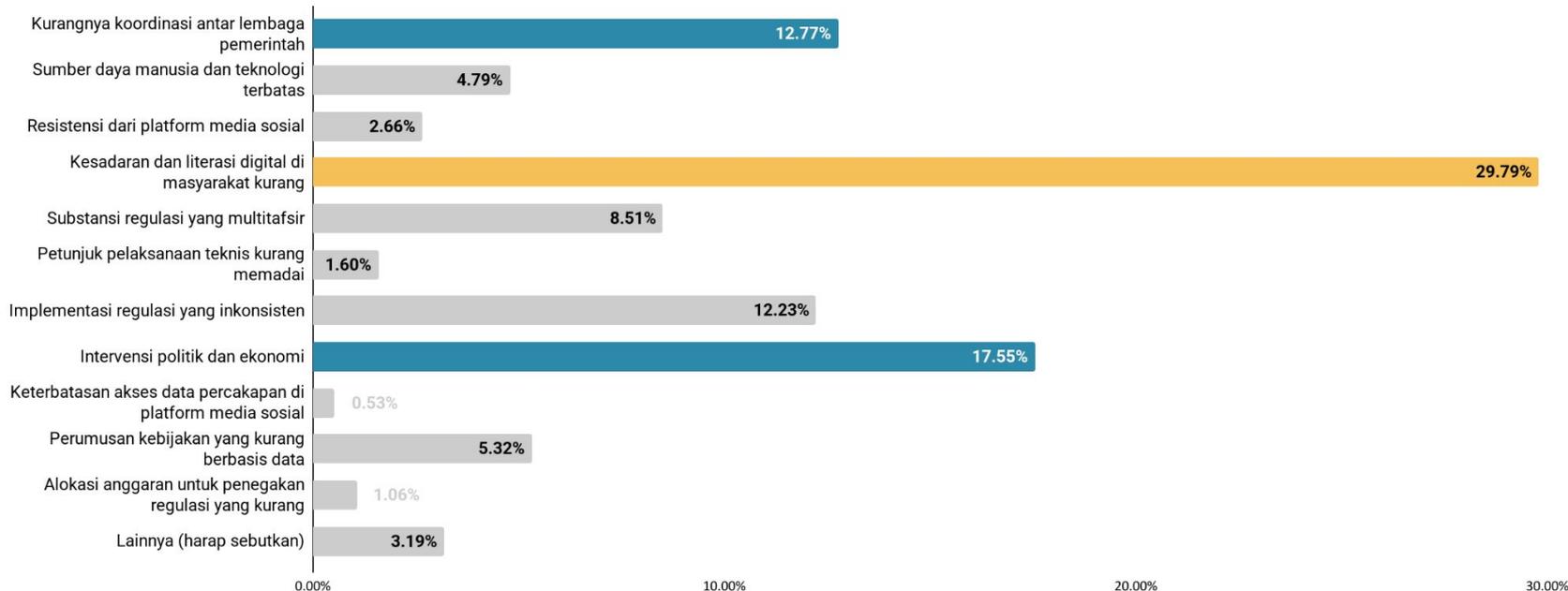


Sebagian besar responden **sangat dan cukup familiar** dengan regulasi-regulasi kunci mis/disinformasi. Namun, sebagian besar pula menilai bahwa regulasi yang ada **kurang atau tidak efektif** dalam menangani mis/disinformasi.



Tantangan Penegakan Regulasi

Apa tantangan terbesar dalam penegakan regulasi mis/disinformasi selama Pemilu 2024?

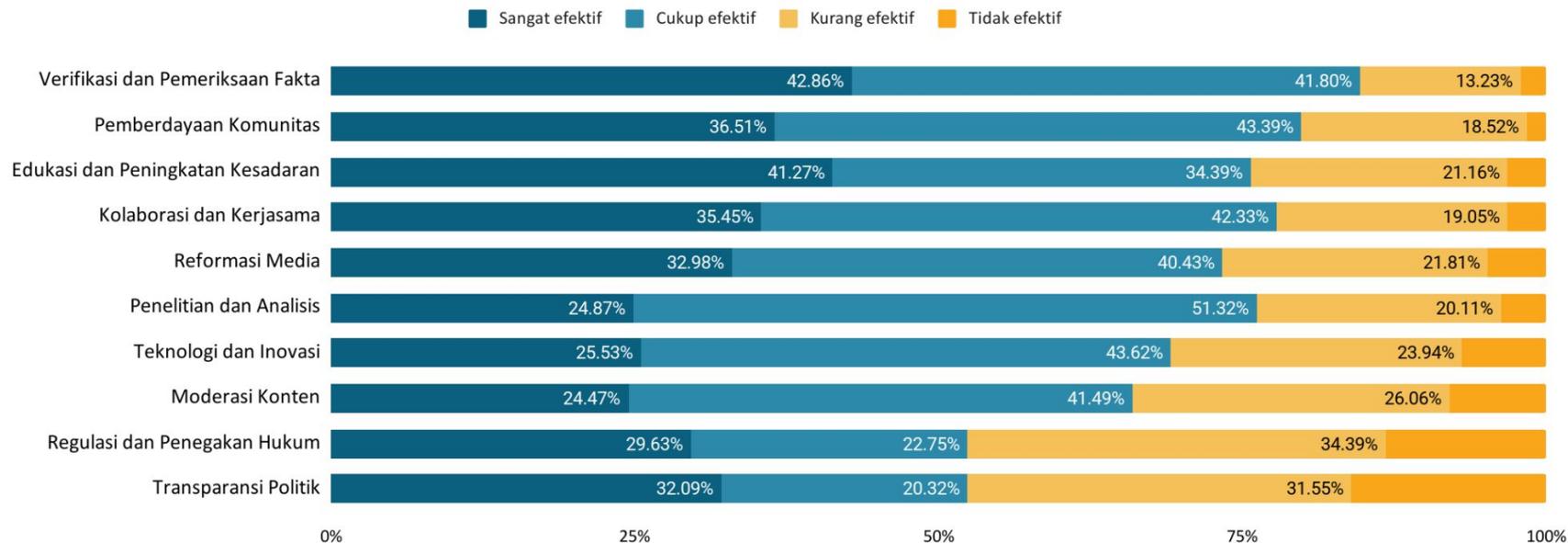


Sebagian besar responden (**29,69 persen**) menganggap **kurangnya kesadaran dan literasi digital di masyarakat** menjadi penghambat penegakan regulasi mis/disinformasi. Disusul dengan **intervensi politik dan ekonomi (17,55 persen)** dan **kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan (12,77 persen)**.



Efektivitas langkah-langkah penanggulangan mis/disinformasi

Seberapa efektifkah langkah-langkah di bawah ini untuk menanggulangi mis/disinformasi selama Pemilu 2024?

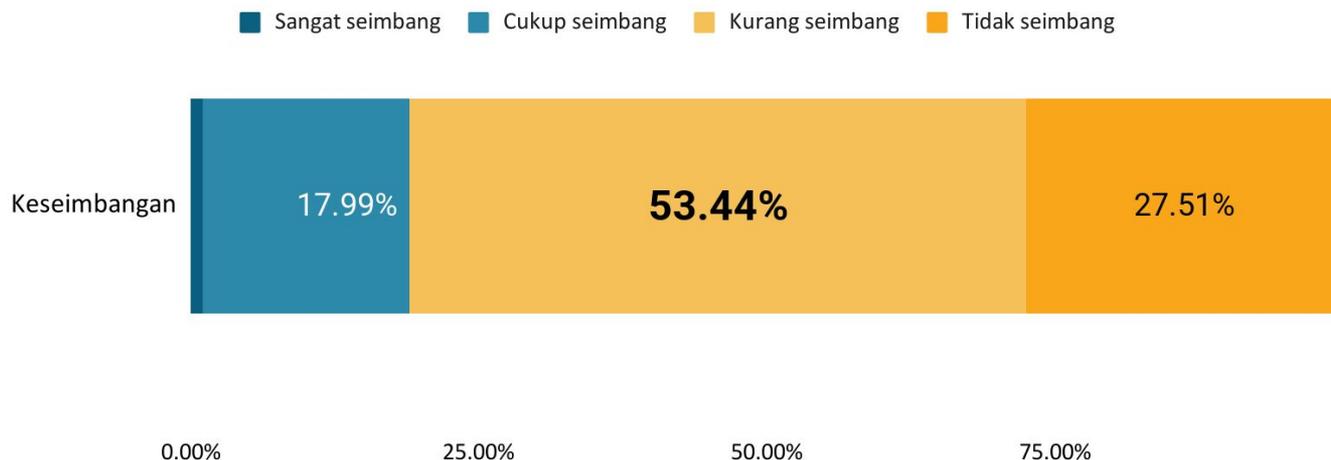


Verifikasi/pemeriksaan fakta, pemberdayaan komunitas, serta edukasi dan peningkatan *awareness* dianggap sebagai langkah paling efektif untuk menanggulangi mis/disinformasi. Sebaliknya, regulasi dan penegakan hukum serta transparansi politik yang relatif dianggap berjalan tidak efektif dalam menanggulangi mis/disinformasi pada Pemilu 2024.



Keseimbangan antara penanggulangan mis/disinformasi dengan kebebasan berekspresi

Bagaimana Anda menilai keseimbangan antara upaya penanggulangan mis/disinformasi dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia?



Mayoritas responden (80,95 persen) menganggap bahwa upaya penanggulangan mis/disinformasi tidak seimbang dengan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.



Bagian Ketiga

Bagaimana para *stakeholder* menilai satu sama lain dalam ekosistem informasi?



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



Rata-rata penilaian kinerja dan transparansi masing-masing kelompok pemangku kepentingan

Bagaimana kinerja dan transparansi lembaga berikut dalam menangani mis/disinformasi?



Organisasi pemeriksa fakta dan **masyarakat sipil** secara umum dipersepsikan memiliki kinerja dan transparansi yang paling baik dalam menangani mis/disinformasi, disusul oleh **media massa** dan **organisasi internasional**. Sedangkan **Koinfo 2019-2024**, **platform teknologi**, dan **lembaga penyelenggara pemilu** secara umum dianggap berkinerja buruk dan tidak transparan dalam menangani mis/disinformasi.

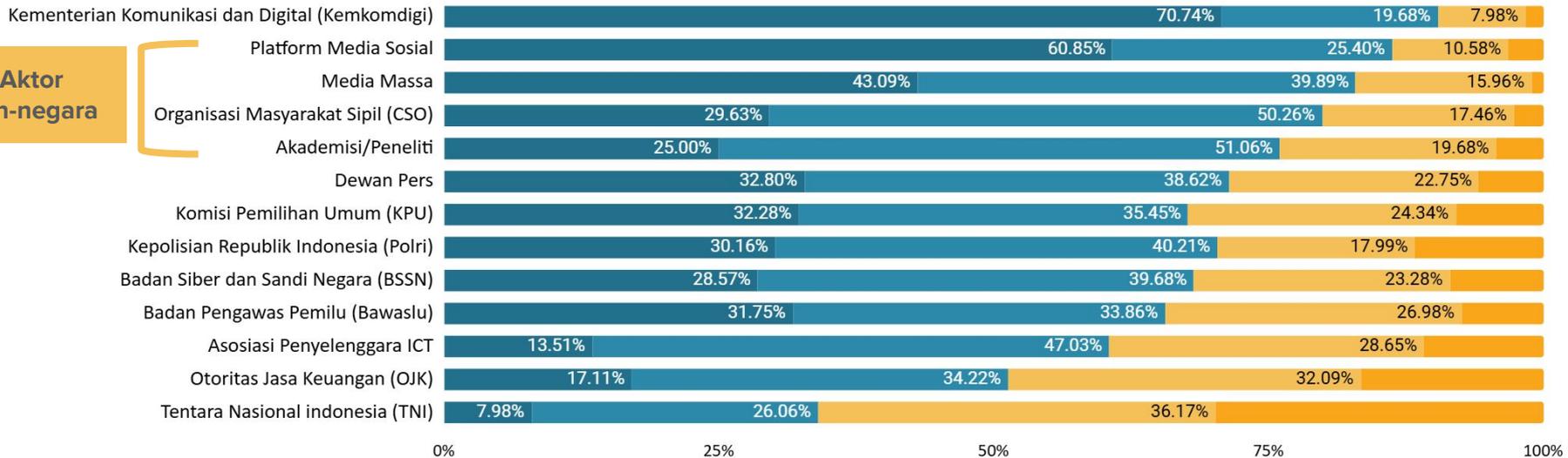


Pengaruh pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan mis/disinformasi

Pada saat ini seberapa besar pengaruh masing-masing pemangku kepentingan berikut dalam membentuk kebijakan penanggulangan mis/disinformasi di Indonesia?

■ Sangat berpengaruh ■ Cukup berpengaruh ■ Kurang berpengaruh ■ Tidak berpengaruh

Aktor non-negara

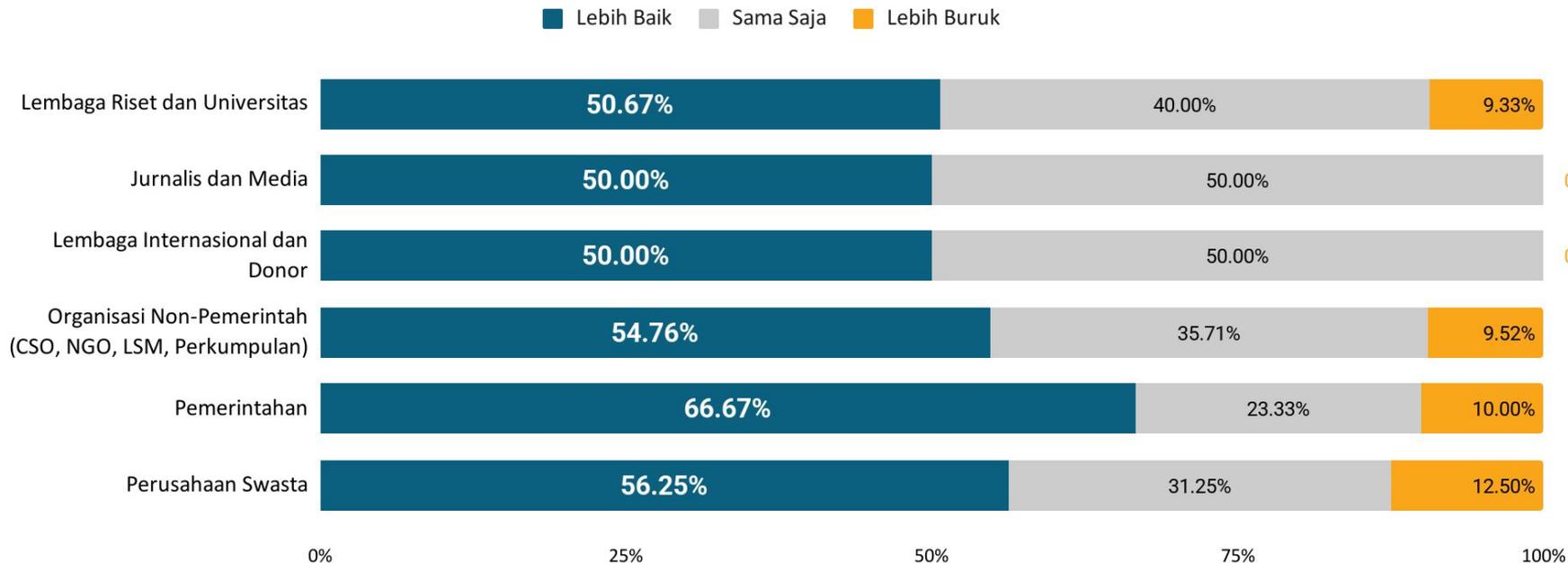


Kementerian Komunikasi dan Digital (90,42 persen) dianggap sebagai aktor yang relatif paling berpengaruh dalam membentuk kebijakan mis/disinformasi. Namun, setelahnya, aktor-aktor non-negara seperti **platform media sosial (86,25 persen)**, **media massa (82,96 persen)**, **masyarakat sipil (79,89 persen)**, serta **akademisi/peneliti (76,06 persen)** juga dianggap relatif berpengaruh.



Tabulasi Silang: Latar Belakang Responden dan Persepsinya terhadap kinerja Komdigi (2024-2029) ke depan

Secara umum, apakah ke depannya kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2024-2029 akan lebih baik atau lebih buruk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024?



Responden **sedikit lebih optimis** bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2024-2029 akan **berkinerja lebih baik** dibandingkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2019-2024. Rata-rata responden yang menjawab “lebih baik” adalah **54,72 persen**.



Bagian Keempat

Menuju kolaborasi multipihak yang berkelanjutan



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



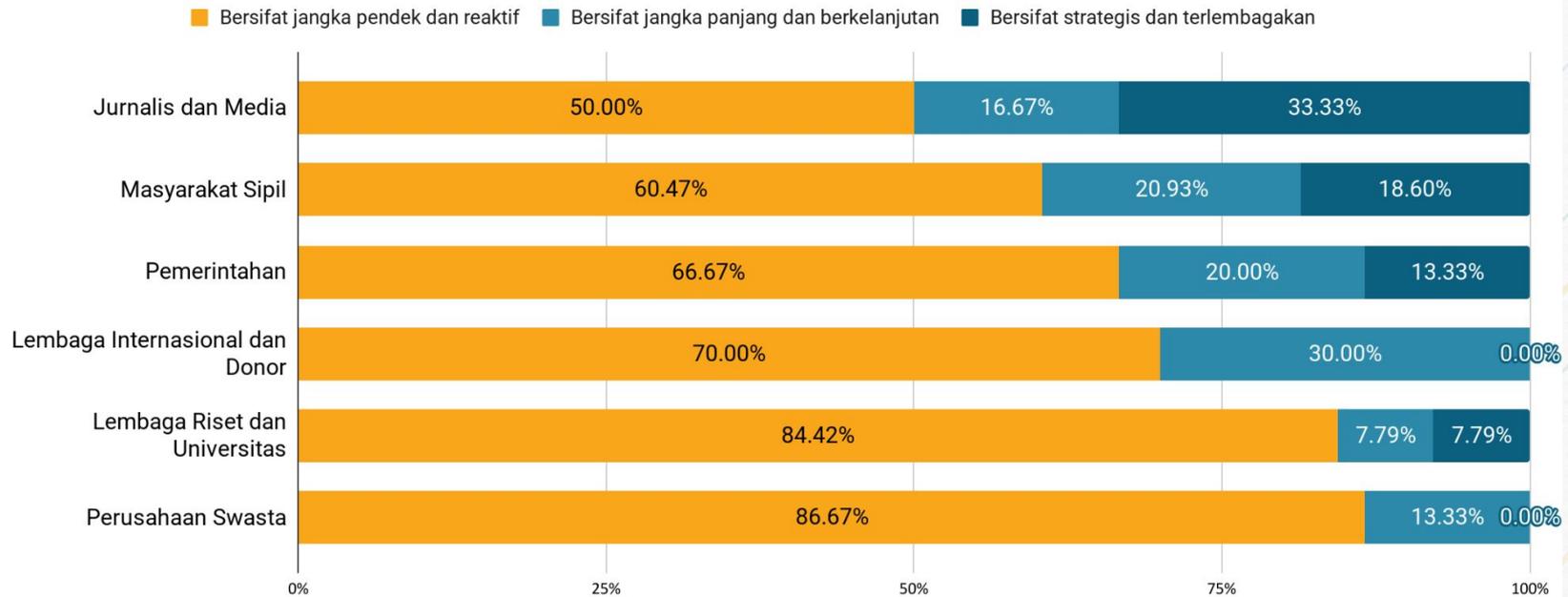
Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



Tabulasi silang: Latar belakang responden dan penilaian bentuk kolaborasi multipihak terkait mis/disinformasi

Bagaimana model kolaborasi multistakeholder dalam menangani mis/disinformasi pemilu di Indonesia saat ini?



Sebagian besar responden (**73.26 persen**) menilai bahwa bentuk kerja sama antar pihak bersifat jangka pendek dan reaktif, terbatas pada inisiatif-inisiatif episodik seperti pemilu, pandemi, atau bencana alam. Responden yang menjawab “bersifat strategis dan terlembagakan” paling besar dari kalangan **jurnalis dan media (33,33 persen)**, meskipun secara keseluruhan masih kecil (11,76 persen).

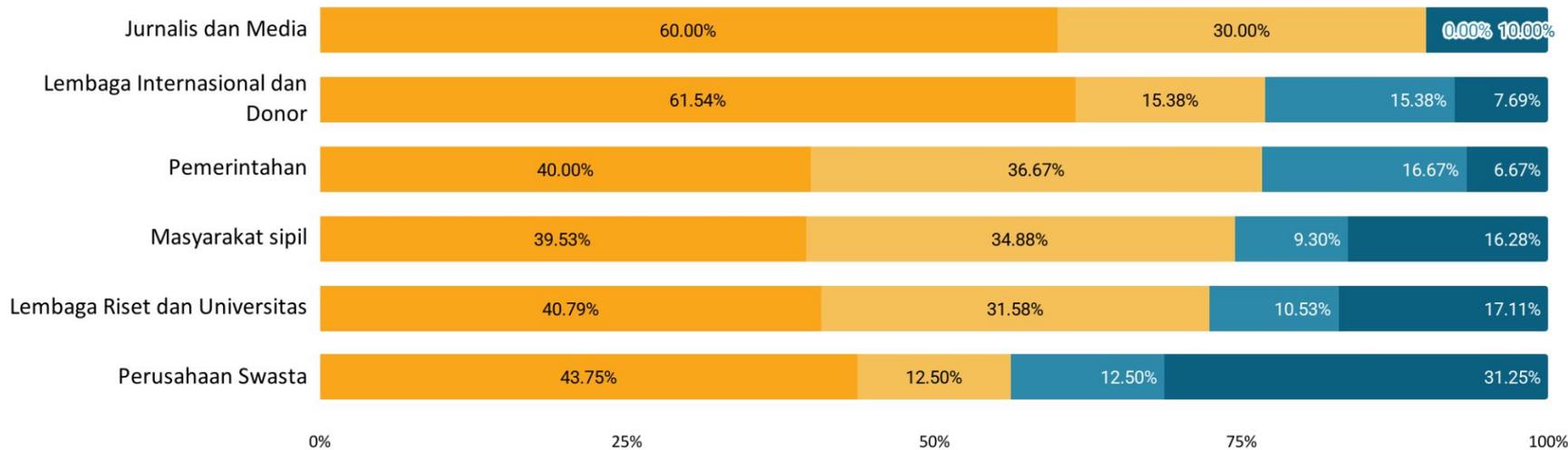


Efektivitas upaya pelebagaan kolaborasi

Seberapa efektif upaya untuk melembagakan kolaborasi multistakeholder dalam menangani mis/disinformasi pemilu di Indonesia saat ini?

Upaya Pelebagaan Kolaborasi Multistakeholder

Tidak efektif Kurang efektif Cukup efektif Sangat efektif



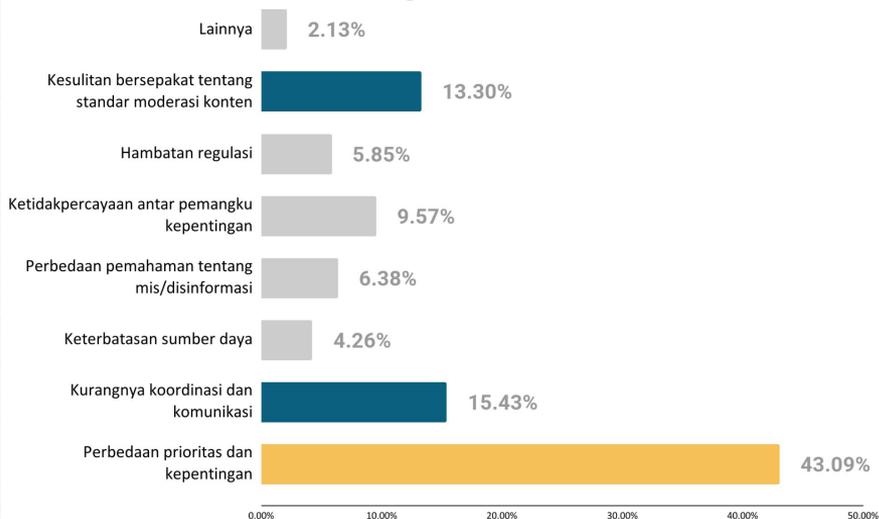
Sebagian besar responden (**58,52 persen**) menilai bahwa upaya pelebagaan kolaborasi multistakeholder berjalan tidak efektif atau kurang efektif. Di antara kelompok pemangku kepentingan, persepsi tidak efektif/kurang efektif terbesar datang dari kelompok **jurnalis dan media** dan **lembaga internasional/donor**.



Tantangan kolaborasi dan keberlanjutan

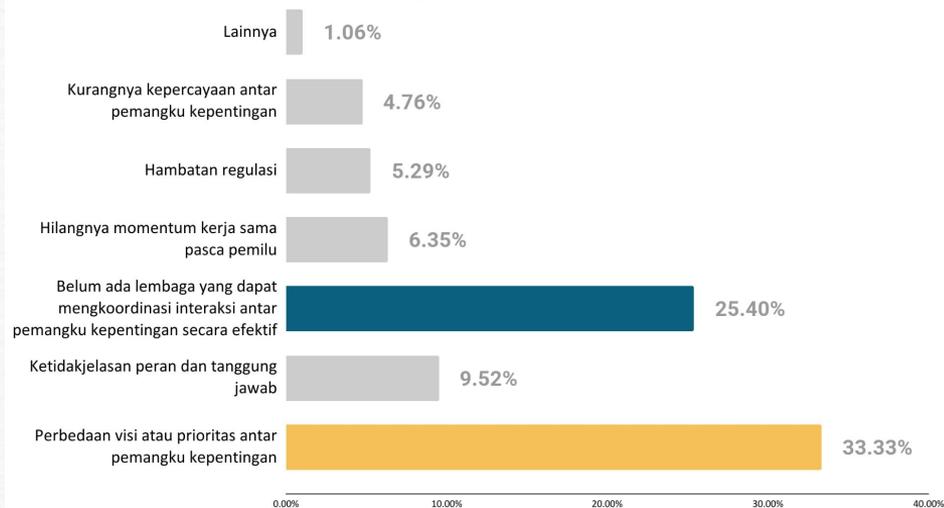
Menurut pendapat Anda, apa tantangan terbesar dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menangani disinformasi? (Pilih salah satu)

Tantangan Kolaborasi



Menurut pendapat Anda, apa faktor utama yang menghambat keberlanjutan kolaborasi multistakeholder dalam menangani disinformasi pemilu di Indonesia? (Pilih satu)

Tantangan Keberlanjutan



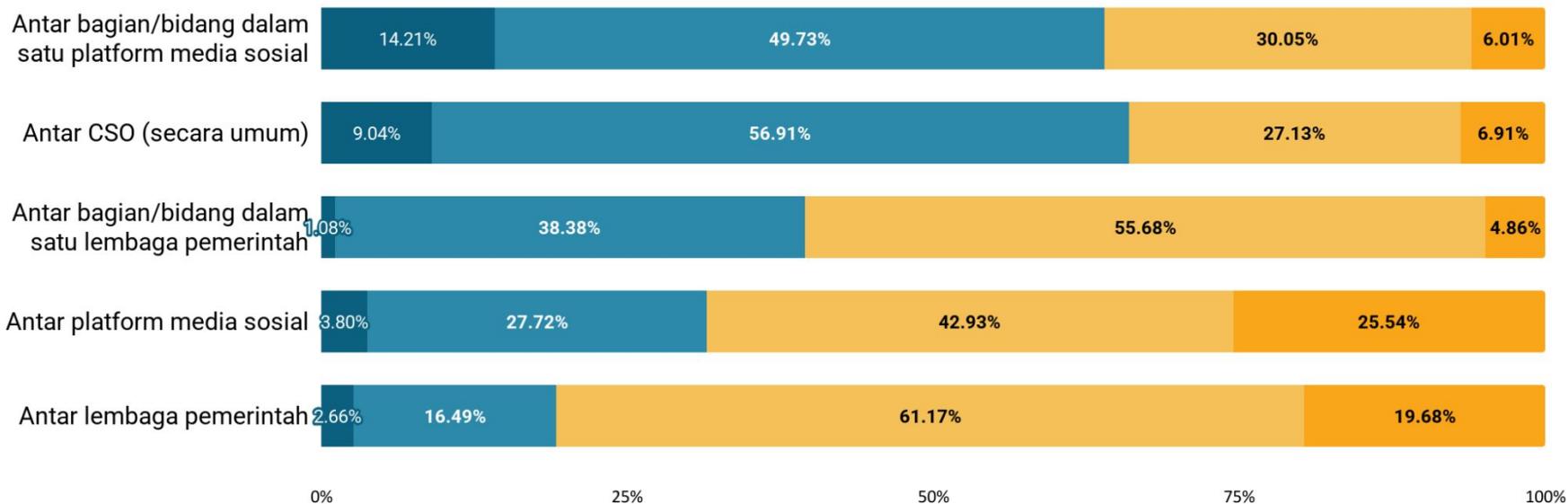
Perbedaan prioritas menjadi tantangan yang paling banyak disebut ketika responden ditanyai mengenai **tantangan terbesar dalam menjalankan kolaborasi (43,09 persen)** untuk menangani mis/disinformasi dan tantangan terkait **keberlanjutan kolaborasi (33,33 persen)** dalam penanganan mis/disinformasi.



Persepsi koordinasi

Menurut pendapat Anda, seberapa terkoordinasi kebijakan penanganan mis/disinformasi pada lembaga-lembaga berikut ini?

■ Sangat terkoordinasi ■ Cukup terkoordinasi ■ Kurang terkoordinasi ■ Tidak terkoordinasi

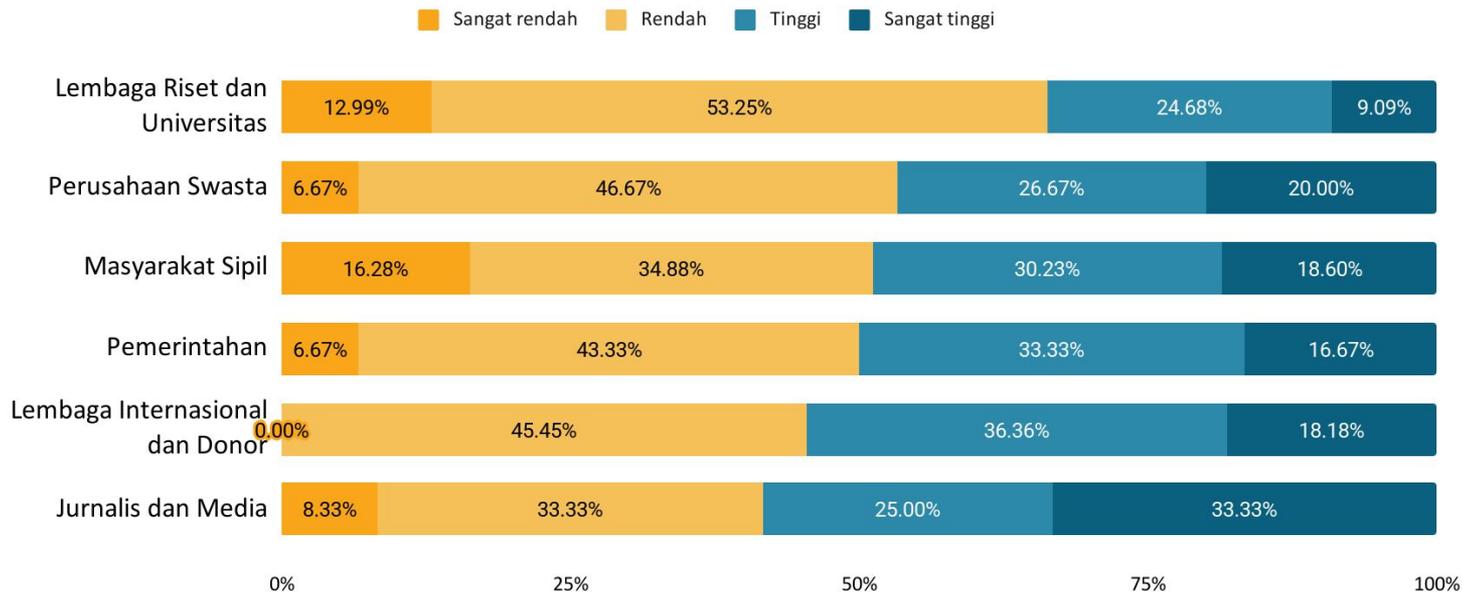


Responden menganggap koordinasi terbaik ada di **antar bagian/bidang dalam satu platform media sosial (63,94 persen)** dan **antar masyarakat sipil secara umum (65,95 persen)**. Sedangkan, koordinasi **antar lembaga pemerintah (19,15 persen)** dan **antar platform media sosial (31,52 persen)** memiliki persepsi koordinasi terendah.



Daya pengaruh Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan teknologi asing

Seberapa tinggi/rendah daya pengaruh Pemerintah Indonesia dalam merancang ekosistem kebijakan saat berhadapan dengan perusahaan teknologi asing?



Responden **terbelah** antara yang mempersepsikan daya pengaruh (*agency*) Pemerintah Indonesia sangat tinggi/tinggi dalam menghadapi perusahaan teknologi asing, dan yang menilai sangat rendah/rendah.



Bagian kelima

Catatan Akhir



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Safer
Internet
Lab
Led by CSIS
in partnership
with Google

Google



Catatan Akhir

- Definisi mis/disinformasi masih bervariasi antar pemangku kepentingan. **Perlu dicapai kesepakatan bersama** tentang tipe konten yang tergolong mis/disinformasi untuk kemudian dicerminkan dalam regulasi, pedoman komunitas, dan agenda advokasi.
- Diperlukan regulasi untuk mengatur transparansi penggunaan AI yang dapat menyeimbangkan *risk-based*, *sectoral*, atau *human rights* approach.
- Verifikasi dan pemeriksaan fakta masih dianggap sebagai **salah satu langkah yang paling efektif** untuk menanggulangi mis/disinformasi. Untuk meningkatkan efektivitas, langkah ini perlu ditunjang (bukan digantikan) dengan langkah-langkah lain seperti *community notes* dan *AI transparency*.



Catatan Akhir

- Seiring dengan **tingginya persepsi peran, transparansi, dan kinerja entitas non-negara**, perlu sarana dialog yang lebih ajeg antara pihak untuk perumusan kebijakan mis/disinformasi.
- Penyesuaian nomenklatur Direktorat Jenderal di bawah Komdigi memerlukan waktu adaptasi. Dalam masa transisi ini, perlu dipastikan bahwa praktik baik dan pembelajaran dari pemilu 2024 lalu **terbawa ke struktur yang baru**. Sehingga perumusan kebijakan dan strategi pelibatan stakeholder non-negara tidak mulai lagi dari nol.





Safer Internet Lab



saferinternetlab.org